

SKRIPSI

**PROSES POLITIK TERPILIHNYA ANDI INA KARTIKA SARI
SEBAGAI KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019-2024**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Disusun oleh:

**NUR RESKI
E 111 16 310**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PROSES POLITIK TERPILIHNYA ANDI INA KARTIKA SARI
SEBAGAI KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

di Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

**NUR RESKI
E 111 16 310**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PROSES POLITIK TERPILIHNYA ANDI INA KARTIKA SARI
SEBAGAI KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019-
2024**

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR RESKI
(E11116310)**

Akan dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal

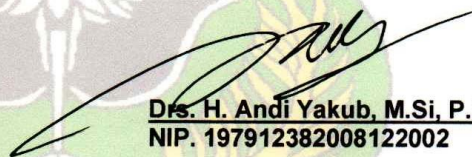
Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si
NIP. 197308131998022001

Pembimbing Pendamping



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP. 197912382008122002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Politik




Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PROSES POLITIK TERPILIHNYA ANDI INA KARTIKA SEBAGAI
KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019-2024**

Disusun dan Diajukan Oleh :

NUR RESKI

E11116310

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. (.....)

Anggota : Prof. Dr. Muhammad, M.Si. (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Reski
NIM : E11116310
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Proses Politik Terpilihnya Andi Ina Kartika Sari Sebagai Ketua DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 16 Maret 2023

Yang menyatakan



(NUR RESKI)

ABSTRAK

Nur Reski. E111 16 310, Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin “**Proses Politik Terpilihnya Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024**” yang dibimbing oleh **Gustiana, A.Kambo** dan **Andi Yakub**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kader partai Golkar dan orientasi partai Golkar menunjuk Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sul-Sel 2019-2024. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan new institusional, teori elit, konsep partai politik, konsep minoritas kreatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk mencari, menggambarkan, dan menganalisis objek penelitian dengan interpretasi yang tepat yang saling terkait dengan tema penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan wawancara, observasi, serta mengumpulkan beberapa literatur yang saling berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan penyebab kader partai Golkar dan orientasi partai Golkar menunjuk Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari berhasil menjadi poros kekuatan baru dalam tubuh Golkar karena sejumlah faktor. Faktor utama dan dominan ialah keberhasilannya memanfaatkan peluang saat menggantikan Andi Pangerang Rahim melalui mekanisme Pengganti antar Waktu (PAW). Dari sinilah ia berhasil membangun kekuatan politik dengan tokoh-tokoh elit partai. Kepemimpinannya sebagai perempuan atau kelompok minoritas dalam politik, juga menjadi wajah baru bagi partai Golkar sekaligus wajah umum politik yang dikenal lazim dengan patriarki.

Kata kunci : Partai Golkar, Andi Ina Kartika Sari, dan Tokoh Elit

ABSTRACT

Nur Reski. E111 16 310, Political Science Study Program, Department of Government Political Science, Faculty of Social and Political Sciences Hasanuddin University "**The Political Process of the Election of Andi Ina Kartika Sari as Chair of the South Sulawesi Provincial DPRD 2019-2024**" which was guided by **Gustiana, A. Kambo** and **Andi Yakub**.

The purpose of this study was to determine the cause of Golkar party cadres and the orientation of the Golkar party to appoint Andi Ina Kartika Sari as Chair of the South Sulawesi DPRD 2019-2024. The approaches used in this research are the new institutional approach, elite theory, the concept of political parties, and the concept of creative minorities.

The research method used in this research is descriptive qualitative, namely to find, describe, and analyze the object of research with the right interpretation that is interrelated with the theme of this research. The method used in obtaining data is by interviewing, observing, and collecting some related literature with the themes raised in this research.

Based on the results of research conducted related to the causes of Golkar party cadres and the orientation of the Golkar party to appoint Andi Ina Kartika Sari as Chair of the South Sulawesi DPRD, Andi Ina Kartika Sari succeeded in becoming a new power axis within Golkar due to a number of factors. The main and dominant factor is his success in taking advantage of opportunities when replacing Andi Pangerang Rahim through the Interim Replacement (PAW) mechanism. From here he managed to build political power with the elite figures of the party. Her leadership as a woman or a minority group in politics has also become a new face for the Golkar party as well as the general face of politics known as patriarchy.

Keywords: Golkar Party, Andi Ina Kartika Sari, and Elite Figures

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil a'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Proses Politik Terpilihnya Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD 2019-2024”**. Salam dan shalawat juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas pelajaran berharganya tentang pentingnya sabar dan tak kenal menyerah di tengah banyaknya rintangan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini namun berkat segala bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang menemani perjalanan penulis, sehingga skripsi ini terselesaikan. Maka pada kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Sukardi dan Alm. Ibu Hajerah, Alm. Ibu Marhani juga Ibu Yuminda yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh

kasih sayang. Kepada nenek Halijah dan kakek Pamelleri yang selalu mendengarkan curhatan penulis dan selalu membagikan kisah-kisah hidupnya serta senantiasa membuat penulis tertawa dengan berbagai lawakannya. Kepada adik penulis Fitri yang jauh di kampung namun selalu menyambut hangat saat penulis berkunjung, juga adik kecil penulis Tsar yang meskipun selalu membuat jengkel tapi tetap penulis sayangi. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, perhatian, motivasi, dan doa.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Gustiana A.Kambo, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing utama dan Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.si, Ph.D selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muh, Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Kakak Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Kakak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Kakak Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh pegawai dan staf fakultas serta staf dan pegawai departemen ilmu politik yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.

6. Keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi rumah dan tempat penulis belajar banyak sehingga bisa seperti sekarang ini.
7. Teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan **Himapol FISIP Unhas** periode 2018-2019 yang sangat memberikan dukungan tenaga dan pikiran serta membuat penulis banyak belajar tentang berlembaga dan saling menghargai satu sama lain. Terimakasih, kalian luar biasa.
8. Saudara saudariku Reformasi 16, **Agung, Gazali, Arin, Mul, Marie, Iwan, Widya, Wawan, Anggun, Caca, Apri, Alfa, Tommi, Anwar, Bias, Indah, Nurul, Ira, Gusti, Riswan, Salwah, Fida, Tenri, Wanda, Wide, Risma**. Kalian mungkin terkadang menyebalkan, tapi ketahuilah bahwa kalian telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan penulis di dunia kampus.
9. Senior-senior yang selalu membantu penulis baik dalam dunia kelembagaan maupun dunia akademik. **Kak Naje, Kak Azis, Kak Sofyan, Kak Marco, Kak Fichri, Kak Siskiu, Kak Unil, Kak Rifan, Kak Galank, Kak Joni, Kak Udin, Kak Wali, Kakak-kakak Amandemen** dan semuanya yang tiada henti berkontribusi.
10. Junior-junior yang selalu menjadi penyemangat dan membantu urusan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. **Adikku Topik, Adik-adik Dekrit 17, Revolusi 18, Diplomasi 19, Dinamis 20, dan Parlemen 21**.

11. Teman-teman **Ilmu Politik 16** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
12. Keluarga besar **KKN Tematik Pulau Sebatik gelombang 102** yang kekeluargaannya masih hangat sampai saat ini.
13. Teman-teman **Posko Desa Lapri**, terkhusus Grup Babi, **Kunni, Pinky, Bunda, Rein, Gabi** yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudari-saudariku RAACE sedari SMA yang masih keep in touch sampai saat ini **Och, Andin, Ainil, Chyntia** yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan nasehat dan tiada hentinya memberikan dukungan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian studi penulis serta selalu menghibur dengan gossip terbarunya. Terimakasih saudara tak sedarahku. Love you
15. Para **The Geeks**, Arkan, Aman, Amin, Ainil yang selalu meluangkan waktu dan mengajak penulis nonton film-film Marvel untuk menghilangkan kejenuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kawan-kawan **Pemadam Kelaparan**, Arin, Cali, Agung, Anggun, Muliadi, Iwan, Wawan, Tomi, Anwar, dan Marie. Terimakasih untuk selalu bisa diandalkan, meskipun terkadang tidak sepemikiran tapi selalu bisa saling memahami. Terimakasih sebanyak-banyaknya untuk Mar'ie dan Agung yang selalu pakaseno-seno tapi selalu menghibur.

17. **Geng Hedonisme**, Darwin, Aperi, Arin, dan Bias. Terimakasih atas ajakan makan-makan mewahnya dan hiburan halu-halunya selalu.
18. Sobat **Celalu Celia**, Kak Naje, Kak Yayat, Kak Siskiu, Kak Mukmin, Abang, Iwan, Wawan, Tomi, dan Andes yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama pandemi dan senantiasa ceria sehingga penulis semangat menyelesaikan tugas akhir penulis.
19. Teman-teman **Bikin Apa Malam Ini** yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Widya, Mul, Caca, Cali, Alfa, Iwan, Wawan, Agung, Marie terimakasih untuk canda tawa, trip-tripnya dan makan-makannya.
20. Geng museum kota, Muses yang telah menjadi tempat yang hangat saat penulis sedang kehilangan motivasi dalam menyelesaikan studi selama pandemi. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada **Kak Kika, Om has, Alip Mendes, Gibe, Nuge, Rio, Kak Nia, Kak Yayang, Om Luken** telah membuka sesi curhat-curhat tiap malam dan kultum malam.
21. **Keluarga besar Café Searah**, Kak Adi, Kak Harum, Kak Sofyan, Kak Basir, Kak Iwan, Kak Malik dan juga **Keluarga besar Collabs.id**, Kak Igo, Kak Inyol, Kak Unil, Kak Fichri, Kak Galank, Kak Siskiu, Topik yang tiada hentinya selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi penulis serta telah menjadi tempat penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas callaan sekaligus dukungan yang sangat memotivasi bagi penulis.

22. Kakakku yang sangat baik hatinya, yang selalu membantu dan menemani penulis dalam kondisi apapun saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya **Kak Siskiuuu**. Loveyouuu hihi
23. **X-Laundry** yang senantiasa menampung penulis disaat penulis tidak tahu ingin kemana dan telah menjadi tempat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
24. The last but not least lelaki special yang selalu menemani penulis, walaupun terkadang menambah beban pikiran tetapi selalu mampu menghibur dan membuat penulis merasa senang riang gembira dengan berbagai lawakan dan tingkah lakunya. Terimakasih sudah selalu ada dan selalu memotivasi penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pendekatan New Institutionalism	12
2.2 Teori Elit	17
2.3 Konsep Minoritas Kreatif dalam Pemikiran Arnold J. Toynbee	21
2.4 Konsep Partai Politik	25
2.5 Kerangka Pemikiran	28
2.6 Skema Pikir	31
BAB III	
METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data	35
3.3.1 Data Primer	35
3.3.2 Data Sekunder	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1. Wawancara	37
3.4.2. Studi Pustaka Dan Dokumen.....	37
3.5 Teknik Analisis Data	38

3.5.1	Reduksi Data	40
3.5.2	Display data.....	40
3.5.3	Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB IV		
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
4.1	Provinsi Sulawesi Selatan.....	42
4.1.1	Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan	42
4.1.2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Sulawesi Selatan	44
4.1.3	Pembagian Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.2.	Gambaran Umum DPRD Sulawesi Selatan	48
4.2.1	Struktur DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	48
4.3.	Gambaran Umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.....	49
	Tabel 4.4 Struktur Pengurus Partai Golkar Kota Makassar 2016-2021.....	51
BAB V		
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		
5.1.	Alasan Andi Ina Kartika Sari Terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024.....	55
5.1.1	Andi Ina Kartika Sari Merepresentasikan Kaum Perempuan.....	55
5.1.2	Pengalaman 2 Periode Andi Ina Kartika Sari di DPRD Provinsi.....	60
5.1.3	Jaringan Andi Ina Kartika Sari dengan Elite Partai Golkar	63
5.2	Orientasi Partai Golkar dalam memilih Andi Ina Kartika Sari Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024.....	67
5.2.1	Proses Tahapan Penentuan untuk Direkomendasikan ke DPP Partai Golkar	68
5.2.2	Keterlibatan Elite Dalam Penentuan Ketua DPRD di Tingkat DPP	72
5.2.3	Orientasi Partai Golkar Dalam Memilih Andi Ina Kartika Sari Sebagai Wujud Representatif Perempuan.....	76
BAB VI		
PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	80
6.2	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	3
Tabel 4.1	43
Tabel 4.2.....	44
Tabel 4.3.....	46
Table 4.4	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu merupakan salah satu ruang untuk berpartisipasi secara langsung dan bentuk nyata dari demokrasi Indonesia.

Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan salah satu wujud perubahan bentuk pemilu di Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pemilihan legislatif dan eksekutif diadakan secara bersamaan atau disebut pemilu serentak. Pemilu serentak ini kemudian berjalan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUUXI/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 diselenggarakan serentak dan telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu wilayah atau daerah

¹ Pahlevi, Indra dkk. 2015. PEMILU SERENTAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Hal. xv

yang ikut menyelenggarakan pemilihan serentak ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD.

Pada pemilu legislatif di provinsi Sulawesi Selatan 2019 terdapat 16 partai politik yang bersaing. Setiap partai tentunya mengusung kader-kader terbaiknya yang dianggap mumpuni untuk menjalankan tugas dalam sistem keterwakilan rakyat melalui syarat dan tahapan pada internal partai masing-masing. Salah satu partai yang ikut dalam kontestasi politik 2019 adalah partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar menyiapkan kader-kadernya untuk diusung menjadi calon legislatif melalui mekanisme yang telah internal partai tetapkan. Melalui kader terbaiknya inilah yang mengantarkan partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu pada pemilihan DPRD provinsi Sulawesi Selatan 2019. Berdasarkan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2019 menempatkan partai Golkar sebagai partai pemenang suara terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan memperoleh 683.444 suara dan menempatkan caleg sebanyak 13 kursi dari total 85 kursi yang diperebutkan pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan.

Adapun hasil perolehan suara yang diperoleh oleh semua partai politik pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 2019-2024 di Sul-Sel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1. **Perolehan Suara dan Kursi Partai di DPRD**

Perolehan Suara dan Kursi Partai di DPRD Sul-Sel		
Partai	Perolehan	
	Suara	Kursi
Golkar	683.444	13
Nasdem	564.642	12
Gerindra	538.232	11
Demokrat	400.151	10
PKS	326.697	8
PKB	312.486	8
PDIP	291.160	8
PAN	314.717	7
P3	240.418	6
Perindo	43.726	1
Hanura	41.045	1
Total		85

Sumber: Pranata, Aan. 19 Mei 2019. *Ini Daftar 85 Caleg Terpilih DPRD Sulsel Dari 11 Dapil Nasional*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/ini-daftar-85-caleg-terpilih-dprd-sulsel-dari-11-dapil-nasional>

Sesuai dengan pasal 354 ayat (3) secara tegas menyebutkan "Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota". Alur pengangkatan Ketua DPRD yaitu melalui Partai Golkar mengusulkan dan mengirim 3 nama caleg yang terpilih ke DPP

Partai Golkar. Sesuai dengan hasil pemilihan umum tahun 2019, Partai Golkar berhasil meraih 13 kursi yang terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan sesuai dengan data yang diperoleh. Maka dengan demikian jabatan kursi ketua DPRD provinsi Sulawesi Selatan menjadi hak sepenuhnya Partai Golongan Karya.

Pemilihan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi hak Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu tidak terlepas dari intrik dan dinamika politik. Pasalnya posisi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi jabatan yang sangat strategis dan menjadi incaran banyak pihak internal atau kader Partai Golkar yang berhasil memenangkan kontestasi pemilu, maka dari itu tentu tidak mudah untuk dipilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Partai Golkar, terdapat 3 tahapan yang diatur oleh internal partai dalam menentukan nama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan yang pertama adalah Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPD I) partai Golkar, yang kedua adalah penentuan nama oleh DPD I, dan yang terakhir adalah keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau Ketua Umum Partai. Dari tahapan tersebut, muncullah beberapa nama yang dianggap memenuhi syarat dan layak dalam menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Diluar daripada ketiga tahapan tersebut, diungkapkan pula oleh Muhammad Risman Pasigai selaku jubiir DPD 1 partai Golkar bahwa terdapat beberapa persyaratan lain dalam

internal partai dalam menentukan salah satunya yaitu memiliki kapasitas pimpinan partai, DPD II kabupaten/kota dan syarat umum lainnya adalah pengalaman. Jika merujuk pada dua syarat tersebut, calon ketua DPRD Sulsel dari Golkar bisa mengerucut ke segelintir caleg.

Pertama, Fachruddin Rangga yang merupakan petahana, sekaligus Ketua DPD II Kabupaten Takalar. Caleg lainnya yang punya peluang seperti Sofyan Syam, dia merupakan petahana DPRD Sulsel. Kemudian Andi Ina Kartikasari yang juga merupakan petahana. Sementara, sebagian besar dari 13 kader Golkar yang mengisi kursi di DPRD Sulsel adalah pendatang baru. Diantaranya Rahman Pina, Debbi Purnama, Ayu Andira, Andi Izman Maulana, hingga Ketua DPRD Sidrap yang sukses naik kelas, Zulkifli Zain.²

Namun demikian, terdapat tiga nama yang diusulkan oleh DPD 1 partai Golkar untuk kemudian dikirimkan dan diteruskan kepada DPP atau Ketua Umum Partai Golkar untuk diputuskan, ketiga nama tersebut adalah Fachruddin Rangga, Rahman Pina, dan Andi Ina Kartikasari. Ketiga kandidat tersebut dianggap mampu dan memiliki kapabilitas sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024 sesuai dengan prasyarat yang diatur dalam PO (Peraturan Organisasi) Golkar.

Rahman Pina meskipun baru di DPRD Sulsel tetapi hal tersebut tidak menjadikannya pesaing yang mudah. Beliau adalah politisi kawakan dengan akses politik lintas partai yang luas. Rahman Pina punya

² Diakses di <https://makassar.sindonews.com/berita/26059/1/fachruddin-rangga-calon-kuat-ketua-dprd-sulsel-2019-2024> pada tanggal 1 juli 2021 pukul 23.30 WITA

pengalaman di DPRD kota Makassar. Beliau adalah anggota DPRD kota Makassar dua periode dan telah memegang beberapa posisi strategis di DPRD kota Makassar.

Tidak hanya berbekalkan pengalaman, Andi Ina Kartikasari adalah seorang putri dari seorang politisi senior partai Golkar yaitu Andi Tja Tjambolang dan itu merupakan modal kuat untuk bisa meraih kursi Ketua DPRD Sulsel. Sang ibunda adalah seorang srikandi Sulsel yang berpengaruh pada masa orde baru. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menjabat sebanyak 3 periode pada masa orde baru yang kemudian membuat Andi Ina Kartikasari terjun pada politik dan memutuskan Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya. Hal ini tentunya membuat Andi Ina Kartika Sari memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan di partai Golkar.

Sama halnya dengan Andi Ina Kartikasari, Fachruddin Rangga memiliki pengalaman dan kedekatan dengan pengambil keputusan di partai Golkar. Beliau telah lama menduduki jabatan-jabatan strategis dan penting di organisasi sayap Golkar. Mulai dari sekretaris dan ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) hingga ketua DPD II Takalar partai Golkar. Menurut Imran Tenri Tata, seluruh persyaratan sudah dipenuhi Fachruddin Rangga. Bahkan syarat penting dari Partai Golkar yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT) juga diyakininya di penuhi oleh Plt Ketua DPD II partai Golkar Takalar ini. Selain sokongan dari sesama kader Golkar, Fachruddin Rangga juga

mendapat dukungan dari luar kader partai; Arum Spink, anggota dewan terpilih Nasdem Sulsel “Saya tentu *mensupport* Fachruddin Rangga untuk menjabat ketua DPRD Sulsel. Saya mendukung beliau karena memiliki kapasitas, integritas dan komunikasi politik yang baik selama ini”. Dukungan ini bukan sekedar personal, namun mengatasmamakan fraksi Nasdem di DPRD Sulsel. “Kami juga dari fraksi Nasdem meminta Golkar untuk mempertimbangkan atau memberi masukan, tanpa mengintervensi agar Fachruddin Rangga diberi kepercayaan menjabat sebagai ketua DPRD Sulsel,” tambahnya.³

Ketiga kandidat ini sangat berpotensi untuk menjadi ketua DPRD Sulsel tapi keputusan tetap pada DPP atau Ketua Umum partai Golkar. Namun selama proses menunggu putusan DPP yang akan mengeluarkan nama dari ketua definitif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tampak upaya antar elit partai dalam mempengaruhi putusan tersebut. Terdapat beberapa kali penundaan bahkan sempat batal diumumkan dalam pengeluaran SK yang sebelumnya telah ditentukan waktunya. Kondisi demikianlah yang berpotensi menjadi arena tarik menarik kepentingan dan berdampak pada proses penentuan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin Halid sebelumnya telah mengumumkan bahwa Andi Ina Kartika Sari merupakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namun pernyataan ini belum didukung oleh SK yang keluar dari DPP. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bisa saja terjadi proses transaksional

³ Diakses di <https://makassar.sindonews.com/berita/30964/1/politikus-golkar-fachruddin-rangga-dijagokan-pimpin-dprd-sulsel> pada 2 Desember 2021 pukul 19.23 WITA

politik, tarik ulur kepentingan antar elit, serta pertarungan kepentingan orang-orang partai.

Setelah melewati proses yang panjang, Ketua Umum DPP partai Golkar memutuskan dengan menyampaikan kepada Ketua DPD I partai Golkar Sulsel secara langsung. “Keputusannya adalah menunjuk Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sulsel definit periode 2019-2024,” ungkap Nurdin Halid. Sebelum keputusan tersebut keluar, Nurdin Halid mengaku terlebih dahulu telah mempresentasikan semua calon yang telah menjalani fit and proper test di hadapan Airlangga. “2 Oktober lalu saya diberi waktu untuk presentasi hasil assessment oleh timsel. Saya diminta presentasi langsung di depan ketua umum,” beber mantan ketua umum PSSI ini.⁴

Keputusan ini tentunya membuat beberapa pihak merasa kecewa. Nurdin Halid mengungkapkan permintaan maaf terhadap anggota fraksi Golkar lain. Dia berharap keputusan ini bisa diterima semua kader. Nurdin Halid juga menegaskan bahwa keputusan DPP bersifat final dan mengikat yang berarti tidak bisa lagi diganggu-gugat. “Mohon maaf kepada Rangga, Rahman Pina. Itulah hasil yang terbaik. Saya adalah orang yang taat asas,” tegasnya.⁵ Namun, pada pengumuman Ketua DPRD Sulsel definitif ini tidak dihadiri Fahrudin Rangga dan Sofyan Hamid.

⁴ Diakses di <https://rakyatku.com/read/166973/resmi-andi-ina-sari-jabat-ketua-dprd-sulsel-periode-2019-2024/amp> pada 16 September 2022 pukul 03.25 WITA

⁵ Diakses di <https://makassar.sindonews.com/> pada 16 September 2022 pukul 03.36 WITA

Ditetapkannya Andi Ina Sebagai ketua DPRD Sulawesi Selatan oleh partai Golkar menjadi menarik untuk diteliti sebab partai Golkar dalam sejarah penunjukan ketua DPRD di Sulawesi Selatan baru pertama kali memilih perempuan sehingga Andi Ina sendiri merupakan ketua DPRD perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Pengutamaan perempuan sebagai platform partai tidak didukung oleh dasar resmi berdasarkan juklak dan fit and proper test. Platform kesetaraan gender yang menjadi dalih terpilihnya Andi Ina yang menjadi ketua tidak didukung argumen mengenai kinerja Andi Ina mengangkat isu gender pada saat menjadi anggota dewan di periode sebelumnya dan kiprahnya pada saat menjadi pengurus KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar). Sehingga dalih tersebut cenderung hanya dibuat untuk melegitimasi terpilihnya Andi Ina sebagai ketua DPRD Sulsel. Hal ini membuat banyak anggapan bahwa ini terjadi bukan semata-mata karena Partai Golkar mendukung gerakan kesetaraan gender dan mulai memperlihatkan bahwa budaya patriarki tidak lagi menjadi penentu utama dalam proses politik tetapi lebih disebabkan oleh adanya indikasi kepentingan elit partai didalam penunjukan Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena proses penunjukan ketua DPRD ini tidak terlepas dari kepentingan elit yang ikut terlibat terlihat dari proses pengusulan yang dilakukan oleh DPD ke DPP. Dalam proses ini DPD selain memilih beberapa nama sesuai dengan aturan partai, juga tentu memilih orang-

orang yang dianggap sejalan dengannya sehingga mampu dengan mudah menjalankan segala kepentingan yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian mengangkat dua jenis rumusan masalah untuk mencari tahu Proses Politik Terpilihnya Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kader partai Golkar memilih Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua DPRD Sulawesi Selatan 2019-2024?
2. Apa orientasi Partai Golkar memilih Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan 2019-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa kader partai Golkar memilih Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sul-Sel 2019-2024
2. Untuk mengetahui apa orientasi Partai Golkar memilih Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Sul-Sel 2019-2024

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Dalam hal ini membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.

A. Manfaat Akademik

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana Proses Politik Terpilihnya Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.
- c. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui Bagaimana Proses Politik Terpilihnya Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejumlah pendekatan dalam menentukan definisi operasional dan perangkat analisis sehingga dapat dengan efektif menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut juga digunakan sebagai dasar menentukan skema pikir.

Penentuan definisi operasional dan sejumlah pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian, berdasarkan pengkajian (telaah) informasi awal. Pengkajian tersebut meliputi identifikasi ruang lingkup objek penelitian; proses penentuan Ketua DPRD Sulsel dalam internal DPP dan DPD Partai Golkar Sulsel. Dari ruang lingkup objek penelitian tersebut, peneliti menggunakan definisi operasional dari 'teori elit' dan konsep 'partai politik'. Kemudian informasi (indikasi) yang merujuk pada adanya dinamika institusi tersebut, menjadi dasar penggunaan pendekatan 'institusionalisme baru', 'minoritas kreatif', dan masih termasuk dalam lingkup kajian 'teori elit'.

2.1 Pendekatan New Institutionalism

Institusionalisme Baru merupakan pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya. Perhatian utama dalam pendekatan ini adalah pada negara dan institusi-institusinya sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak

pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas; yang ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik pilihan mereka.⁶

Bagi pendekatan Institusional Baru negara sebagai institusi merupakan aktor tersendiri yang berdiri sendiri dan tidak merepresentasikan kelas atau kelompok yang berada di dalam masyarakat. Pada intinya institusi politik dapat dipahami sebagai aturan permainan atau *rules of the game* yang dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti dari sifatnya yang formal (undang-undang, peraturan-peraturan) atau informal (kebiasaan, norma sosial, adat istiadat dan seterusnya), tertulis atau tidak tertulis. Dalam pengertian yang lebih sempit ia berarti tata tertib untuk mengatur perilaku sekelompok manusia dan suatu proses pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Keberadaan institusi politik dalam masyarakat disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama di antara mereka dan kehidupan bersama yang perlu diatur bersama. Hal ini mendorong mereka untuk mengorganisasi diri dan membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur kebersamaan dan kehidupan mereka. Lahirnya peraturan-peraturan ditengah masyarakat juga sebagai dasar

⁶ Budiardjo, Miriam. Soeseno, Nuri. Dan Rosa Evaquarta. *IlmuPolitik: Ruang Lingkup dan Konsep*. Modul 1.

atau tonggak bagaimana masyarakat bergerak untuk mencapai suatu kepentingan yang telah lahir di antara mereka.

Pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti birokrasi, parlemen, presiden, dan seterusnya, merupakan salah satu bentuk institusi tersebut. Selain itu, juga organisasi-organisasi dalam masyarakat merupakan bentuk institusi politik seperti partai politik, organisasi akar rumput, masyarakat sipil, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini maka ilmu politik kembali memfokuskan perhatian pada negara termasuk aspek legal institusionalnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan adanya institusi-institusi maka dapat dipastikan adanya aturan-aturan atau pola pengaturan yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan kolektif yang ada dalam sebuah masyarakat. Hal ini tentu memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bagi warga. Oleh karena institusi mempunyai kekuasaan yang secara relatif otonom maka ia tidak dapat diubah dengan semuanya sendiri. Keberadaan institusi dengan demikian memungkinkan adanya stabilitas di dalam masyarakat. Institusi-institusi dengan demikian dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kolektif, yang berupa peraturan atau norma perilaku dan peran, yang memberi keuntungan, peluang dan kekuatan pada serta memelihara individu atau kelompok. Mengingat kegunaannya ini maka menjadi sangat penting untuk membentuk institusi yang dapat menghimpun kepentingan sebanyak mungkin pilihan masyarakat untuk menentukan kepentingan kolektif.

Pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, di samping, juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris.⁷ Sebagai contoh, “institusionalisme lama” sistem presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “institusionalisme baru”, melihat lebih jauh dan mencoba untuk mencari tahu apakah perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, bagaimana mengatur kehidupan politik yang berbeda tersebut? Apakah perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja pemerintah?⁸ Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga merefleksikan bahwa pendekatan institusionalisme baru juga melihat bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Hall dan Taylor membagi pendekatan institusionalisme baru kedalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (historical institutionalism), institusionalisme pilihan rasional (rational choice institutionalism) dan institusionalisme sosiologis (sociological institutionalism).⁹

⁷ Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq. dan Tri Hendra Wahyudi. 2016. *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilu Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1. Universitas Brawijaya. Malang

⁸ Peters, B. G. (2011). *Institutional theory in political science: the new institutionalism*. Bloomsbury Publishing USA.

⁹ Hall, P. A., & Taylor, R. C. (1996). *Political science and the three new institutionalisms*. *Political Studies*. Hal 9.

Pengangkatan Ketua DPRD adalah hak dan kewenangan dari partai politik, meskipun secara kelembagaan telah diatur dalam internal partai mengenai mekanisme pengangkatan ketua DPRD, namun tentu ada faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Andi Ina sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga Pendekatan New Institutionalism digunakan untuk melihat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pendekatan kelembagaan baru—demi membedakan diri dengan pendekatan kelembagaan lama yang formalistik—menyatakan bahwa lembaga adalah organisasi *plus* nilai atau norma. Jadi bila seseorang berhasil masuk ke dalam sebuah organisasi (formal maupun informal) maka dia harus memahami bahwa terdapat nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur perilaku anggota organisasi. Norma-norma inilah yang mengatur bagaimana anggota sebaiknya berperilaku, namun disisi yang lain mereka juga dapat menentukan arah [dan memanipulasi] keberadaan norma melalui aturan main (*rule of the game*) yang sudah disepakati bersama demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam konteks pencalonan dan penetapan ketua DPRD Sulsel dalam tubuh fraksi Golkar, ada kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan. Asumsi ini didasari dari proses penetapan ketua dewan yang mencuat di berbagai media dengan sejumlah opini dugaan tarik ulur antara relit. Seperti *Fajar* dengan judul berita 'Siapa Bermanuver Sandera SK Ketua DPRD Sulsel?' Keberadaan norma dalam setiap kelompok internal

partai merupakan hal lumrah terjadi. Jika kelompok tertentu memenangkan pertarungan, menguasai, mengontrol satu partai maka tentu saja keuntungan menguntungkan untuk kelompok mereka, bukan kelompok lain. Seperti isu dualisme dalam Golkar antara kubu Abu Rizal dan kubu Agung Laksono 2015 lalu. Kondisi pertarungan antara kubu elit dalam internal DPD Golkar Sulsel-pun demikian. Imbasnya dapat dilihat pada saat proses penetapan Andi Ina Kartika Sari.

Perilaku semacam ini, menurut Helmke dan Levitsky, dalam buku *Informal Institution* terjadi secara kolektif (*collective action*) dan dapat menyerap aktor-aktor tunggal untuk masuk dalam aturan main yang berlaku internal. Ingatlah bagaimana istilah 'korupsi berjamaah' digaungkan oleh banyak pihak dalam menggambarkan fenomena politik ini. Kebersamaan bertindak ini merujuk bukan hanya mereka di dalam satu institusi formal/informal, namun juga melibatkan pihak lain di luarnya dengan kepentingan yang sama. Itulah mengapa ada beberapa pihak yang meragukan politisi yang berpikiran dapat mengubah sebuah struktur yang tidak baik menjadi baik bila ia telah berada di dalamnya.

2.2 Teori Elit

Secara umum elit adalah suatu kelompok masyarakat minoritas yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Elit merujuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada

posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit.

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Individu atau sekelompok individu inilah yang lazim disebut elite.¹⁰

Elite menurut Suzzana Keller, berasal dari kata eligere, yang berarti orang-orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok atau kelompok kecil orang-orang yang terpandang dan berderajat tinggi, Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain, elite adalah kelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial di atas warga masyarakat lainnya.¹¹

Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite),

¹⁰Sartono Kartodirdjo (ed), Pesta Demokrasi di Pedesaan (Yogyakarta:Aditya Media,1992), 131

¹¹Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern, PT. Raja Grafindo persada :jakarta,1995,hlm 33.

sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elite).¹²

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non governing elite). Kedua, lapisan rendah (non-elite) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elite politik.¹³

Pada umumnya, individu atau sekelompok individu yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu akan tampil sebagai pemimpin di masyarakatnya. Mereka akan mengarahkan individu-individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, kelompok

¹²Diakses di <http://digilib.uinsby.ac.id/18403/7/Bab%202.pdf> pada 28 juli 2021 pukul 20.22 WITA

¹³ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, hlm. 203

yang memimpin dan dipimpin akan muncul di masyarakat. Atau dalam istilah lain, kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk disimak pendapat yang dikemukakan Pareto dan Mosca. Baik Pareto ataupun Mosca menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat masih tradisional ataupun yang modern, pasti dapat ditemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.

Konsep pergantian elit juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian: (1) di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri. (2) di antara elit dengan penduduk lainnya.

Pareto dan Mosca mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michels yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite

sebenarnya bersifat pluralistik. Sosok Nya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.¹⁴

Pada pemilihan ketua DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan 2019 merupakan arena strategis bagi para elit dalam partai untuk memperoleh kemenangan. Dalam partai politik ranah lokal, akan ditemukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Keller sebagai elite penentu. Orang yang punya pengaruh dalam partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan merupakan penentu kebijakan dalam sebuah partai (ketua umum), meskipun hanya sebagai pengurus daerah partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain, maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai.

2.3 Konsep Minoritas Kreatif dalam Pemikiran Arnold J. Toynbee

Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkenal karena konsep *creative minority* (minoritas kreatif)-nya dalam menggambarkan kebangkitan 21 peradaban dan imperium di dunia, seperti Sumeria,

¹⁴ Ibid. hal. 35

Akkadian, Babylonia, Hellenis (Romawi), Minoan, Mycenaean, dll.¹⁵ Menurut Tonybee peradaban-peradaban itu muncul karena adanya sekelompok kecil orang yang kreatif yang mempunyai gagasan, cita-cita, dan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian membangun peradaban (paradigma baru). Sebagai contoh, Imperium Romawi mungkin tidak akan pernah ada jika tidak dimulai dari Romulus (mitodologi romawi) yang membangun kota Roma sekitar 700 tahun SM. Selanjutnya para petani yang tinggal di bagian utara Roma, yang disebut *Etruscan* atau Etruskani membangun kerajaan Romawi Kuno, yang kelak di tahun 509 SM menjadi Republik Romawi. Demikianlah, akhirnya Romawi berkembang menjadi sebuah imperium yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Menurut Toynbee, peradaban Romawi dibangun oleh sekelompok petani kreatif, atau minoritas kreatif saja. Tidak hanya romawi yang menurutnya dibangun oleh minoritas kreatif. Imperium Mongol yang hampir menguasai seluruh dataran dunia oleh Jenghis Khan yang awalnya hanya sendiri bermimpi untuk menguasai dunia. Kreatif dalam perjuangan Jenghis Khan terakumulasi dalam tindakan-tindakan strategis dan taktis yang menghasilkan sebuah kejayaan.

Minoritas kreatif adalah sekelompok orang yang menginisiasi sebuah perubahan dan mengoptimalkan daya kreatif mereka membangun kekuatan besar. Dari mereka bermula gagasan yang hendak diwujudkan, terbangunnya kekuatan sosial yang makin lama semakin

¹⁵ *Toynbee, Arnold J. 1951. A Study Of History. Volume IV. London.-New York: Toronto Oxford University Press*

besar, sehingga dapat menumbangkan kekuatan dominan yang menghimpit atau menindas mereka. Minoritas kreatif dibagi menjadi dua kelompok: *pertama*, yang diinisiasi oleh satu individu, kemudian ia merekrut orang-orang yang sepaham. Individu tersebut mempunyai kemampuan besar dalam menanamkan keyakinan kepada orang-orang yang direkrutnya, sehingga memperoleh komitmen dan kesetiaan. Dilihat dari perspektif komunikasi, ia adalah seorang komunikator yang efektif, sekaligus juga pribadi yang dapat dipercaya. Dalam kelompok ini kepemimpinan bersifat individual dan berlaku pola hubungan yang hierarkis. *Kedua*, kelompok yang tumbuh secara egaliter. Pada dasarnya semua anggota kelompok itu punya kemampuan relatif sama. Mereka punya kemampuan untuk saling mengikatkan diri, saling membantu, dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Tidak ada pribadi yang terlalu istimewa di antara mereka seperti pada kelompok pertama. Pemimpin mereka adalah kesepakatan yang ditaati, bukan individu.

Minoritas kreatif merupakan sekelompok manusia atau individu yang memiliki self determining (kemampuan untuk menentukan apa yang hendak dilakukan secara tepat dan dengan semangat yang kuat). Bukan hanya memiliki self determining, melainkan mereka juga mempunyai kreatifitas untuk menanggapi lingkungan alamiah dan sosial. Artinya dalam segi jumlah, jumlahnya memang sedikit, namun mereka berperan vital sebagai panutan atau pemandu masyarakat kebanyakan dalam

menanggapi tantangan zaman. Interaksi minoritas kreatif dengan lingkungannya terjadi dalam dan melalui mekanisme tantangan dan tanggapan (*challenge and response*). Mula-mula, lingkungan bersifat alamiah (fisik), kemudian sosial, yang menantang kaum Muslim klasik. Lantas, masyarakat, melalui minoritas kreatif di antara mereka, menentukan cara menanggapi (*merespons*) tantangan lingkungan alamiah dan sosial. Segera setelah itu – berkat kepercayaan kepada minoritas kreatif – masyarakat menanggapi tantangan lingkungan alamiah dan sosialnya, dan demikian seterusnya dalam menanggapi tantangan-tantangan baru.¹⁶

Dalam penelitian ini akan menggunakan konsep *creative minority* (minoritas kreatif) yang dijelaskan oleh Arnold J. Toynbee sebagai dasar dalam melihat fenomena yang diteliti pada tulisan ini menyangkut posisi Andi Ina Kartika Sari sebagai bagian dari minoritas kreatif dalam hal ini dirinya sebagai perempuan yang mencoba mengubah paradigma masyarakat dalam dunia perpolitikan. Kondisi politik hari ini masih memosisikan perempuan sebagai kelompok minoritas. Hadirnya Andi Ina Kartika Sari sebagai kelompok minoritas dalam politik yang mana pada kasus ini posisinya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pengaruh besar terhadap pandangan umum menyangkut perempuan dalam politik. Oleh karena itu, berangkat dari konsep Arnold J. Toynbee tentang *creative minority* (minoritas kreatif) penulis beranggapan

¹⁶ Piotr Sztompka. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media. Hlm 173-174.

bahwa tepat memilih konsep ini sebagai landasan berpikir melihat posisi Andi Ina Kartika Sari sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk kelompok minoritas kreatif yang memperjuangkan perubahan paradigma perempuan dalam politik.

2.4 Konsep Partai Politik

Menurut Heywood partai adalah sebuah kelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintah, melalui sarana pemilihan atau yang lain. Partai-partai dapat bersifat otoriter atau demokratis, mereka mungkin meraih kekuasaan melalui pemilihan atau melalui revolusi dan mereka mungkin mengusung ideologi-ideologi aliran kiri, kanan atau tengah, bahkan meningkari ide-ide politik sama sekali. Perkembangan partai-partai politik dan pembentukan sebuah sistem partai telah diakui sebagai salah satu tanda modernisasi politik.¹⁷

Partai politik adalah salah satu institusi penting dalam demokrasi modern yang mengandaikan sistem keterwakilan (representatives). Keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Partai politik akan mempengaruhi dan bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, di negara-negara maju, ukuran keberhasilan demokrasi secara tepat bisa dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan fungsinya untuk memasukan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat tidak saja bagi konstituen pemilihnya melainkan juga bermanfaat bagi seluruh

¹⁷ Heywood. *Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

komponen bangsa yang ada. Maka bisa dikatakan, partai politik adalah institusi inti demokrasi.

Lawson mengartikan lain, bahwa partai adalah sebuah agensi, yang menghubungkan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Definisi lain mengartikan partai politik adalah penerjemahan dari struktural sistem atau mengubah struktur kepentingan sosial dan ekonomi menjadi kekuasaan politik.¹⁸ Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu pilar demokrasi. Sebagai suatu pilar demokrasi, partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta

¹⁸Maor, Moshe, *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*, (London and New York: Routledge, 1997).hlm. 5.

menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.¹⁹

Partai politik dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal rekrutmen itu biasanya mengikuti aturan formal dalam suatu partai tersebut. Ada beberapa mekanisme yang dilalui partai politik untuk memenuhi syarat utama dalam menentukan kader layak untuk mencalonkan maupun dicalonkan. Secara umum rekrutmen biasanya meliputi tiga tahap yaitu tahap sertifikasi, nominasi, dan tahap pemilihan. Tahap sertifikasi merupakan tahap awal atau pendefinisian, yang antara lain mencakup penentuan kriteria yang dikehendaki, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial. Sementara tahap nominasi berkaitan dengan ketersediaan (kader-kader partai) yang memenuhi syarat dan posisi yang akan diisi. Sedangkan tahapan selanjutnya berkaitan dengan proses pemilihan.

Berangkat dari serangkaian penjelasan konsep partai politik maka pada studi ini akan digunakan dalam penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana fenomena keterpilihan Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam internal partai Golkar yang dikaitkan dengan dinamika elit didalamnya.

¹⁹ Syamsuddin Haris dkk. PANDUAN REKRUTMEN & KADERISASI PARTAI POLITIK IDEAL DI INDONESIA. Jakarta. 2016 hlm 3

2.5 Kerangka Pemikiran

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dan merupakan salah satu ruang untuk berpartisipasi secara langsung. Pemilu merupakan bentuk nyata dari demokrasi Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 silam merupakan salah satu wujud perubahan bentuk pemilu di Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pemilihan legislatif dan eksekutif diadakan secara bersamaan atau biasa disebut dengan pemilu serentak.

Provinsi Sulawesi Selatan ikut menyelenggarakan pemilihan serentak pada pemilihan 2019-2024 lalu. Salah satu partai yang ikut dalam kontestasi politik 2019 adalah partai Golkar yang merupakan partai besar dan tentunya memiliki kekuatan politik yang besar pula. Eksistensi partai Golkar di Sulsel lahir sejak masa orde baru dengan beberapa kemenangan pemilu. Hal tersebut mengantarkan partai Golkar sebagai pemenang pemilu di provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan memperoleh suara sebanyak 683.444 suara berdasarkan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2019 dan menempatkan caleg terbanyak yaitu 13 kursi dari total 85 kursi. Maka dengan demikian jabatan kursi ketua DPRD Sul-Sel menjadi hak sepenuhnya partai Golkar.

Pemilihan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi hak partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu tidak terlepas dari intrik dan dinamika politik. Pasalnya, posisi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan jabatan yang sangat strategis dan menjadi incaran

banyak pihak internal atau kader partai Golkar. Namun, untuk mendapatkan posisi tersebut ada syarat ataupun tahapan yang harus dilalui kader partai Golkar. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Partai Golkar, terdapat 3 tahapan yang diatur oleh internal partai dalam menentukan nama Ketua DPRD Provinsi. Tahapan yang pertama adalah Rapat Pleno, yang kedua adalah penentuan nama oleh DPD 1, dan yang terakhir ada keputusan DPP atau Ketua Umum Partai.

Beberapa nama yang dianggap memenuhi syarat dan layak dalam menduduki posisi ini yakni diantaranya adalah Fachruddin Rangga, Andi Ina Kartika, Andi Hatta Marakarma, Sofyan Syam, Jhon Rendeng, Zulkifli Zain, dan Rahman Pina. Namun, hanya terdapat tiga nama yang diusulkan oleh DPD 1 partai Golkar untuk dikirimkan dan diteruskan kepada DPP atau Ketua Umum Partai Golkar untuk diputuskan, ketiga nama tersebut adalah Fachruddin Rangga, Rahman Pina, serta Andi Ina Kartikasari. Proses keluarnya SK DPP yang menetapkan nama ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sempat mengalami penundaan. Penundaan ini yang kemudian dilihat oleh penulis sebagai indikator bahwa terdapat proses transaksional politik, tarik ulur kepentingan antar elit, serta pertarungan kepentingan orang-orang partai. Meskipun pada akhirnya SK DPP menetapkan Andi Ina Kartikasari sebagai Ketua Definitif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, proses politik yang terjadi dibalik keputusan ini menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam oleh penulis.

Proses yang sejatinya bergerak pada ruang non formal dan merupakan proses tarikan kepentingan, maka penulis akan menggunakan teori kelembagaan baru sebagai pisau analisis untuk mengungkap dan mengidentifikasi segala bentuk intrik serta dinamika politik yang terjadi. Teori kelembagaan baru sejatinya menjadi angin baru dalam melihat dinamika politik di berbagai institusi yang ada. Kelembagaan baru memberikan gambaran serta sudut pandang yang lebih luas dan fleksibel dalam memandang proses politik baik dalam institusi pemerintahan ataupun institusi politik seperti partai. Teori ini menjadi cukup trend karena mampu mengupas sebuah kasus dari perspektif non-regulatif. Sudut pandang ini oleh banyak pihak dianggap lebih efektif, mengingat kondisi perpolitikan baik global maupun lokal sangatlah bergantung pada tarikan elit serta kepentingan yang mengekor pada tiap-tiap elit politik.

2.6 Skema Pikir

Penulis berupaya menjawab rumusan masalah penelitian dengan memetakan aspek-aspek kausalitas dari fenomena tersebut. Aspek utama yang perlu dipahami ialah proses dan mekanisme Partai Golkar dalam menetapkan calon ketua DPRD. Proses dan mekanisme merupakan koridor aturan main (*rule of the game*) yang wajib dipatuhi sebagai petunjuk pelaksanaan berdasarkan aturan partai.

Proses dan mekanisme dalam aturan partai menjadi titik berangkat untuk memahami dinamika politik yang terjadi dan orientasi partai politik. Proses penunjukkan calon ketua sendiri menciptakan proses politik (dinamika politik) dalam tubuh partai, yakni upaya bakal calon memenangkan kursi ketua menggunakan afiliasinya dengan tokoh elit partai. Oleh karena itu, pada skema pikir yang dijabarkan pada bagan di bawah ini, proses dan mekanisme dapat menunjukkan dinamika politik yang terjadi.

Selain dari proses dan mekanisme partai, orientasi partai Golkar memilih Andi Ina Kartika Sari juga dapat diketahui dari dinamika yang terjadi. Mengingat semua calon menunjukkan kelayakan atau masuk dalam kriteria berdasarkan aturan partai (mekanisme dalam juklak), maka pemilihannya juga akan bergantung pada dinamika yang terjadi antara elit partai. Sehingga terpilihnya Andi Ina Kartika Sari adalah buah dari orientasi partai dan dinamika yang terjadi.

